

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Kesemerawutan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum teratasi hingga saat ini diduga adalah akibat lemahnya koordinasi antar instansi yang terlibat di dalamnya. Untuk membuktikan hal tersebut peneliti menganalisis koordinasi yang berjalan antara Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Tata Kota dan Pariwisata, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Metro dengan menggunakan indikator koordinasi yang efektif menurut Taliziduhu Ndraha.

Setelah dianalisis dengan menggunakan ketujuh indikator tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa koordinasi antara Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Tata Kota dan Pariwisata dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Metro selama ini sudah sebagian besar terlaksana. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang ketercapaiannya belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya bentuk kesepakatan yang terjalin antara ketiga dinas tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidakmampuan Dinas Perdagangan dan Pasar untuk menjalankan kesepakatan dan komitmennya dalam melakukan sosialisasi kepada PKL yang

akan dipindahkan. Ditambah lagi dengan tidak ditetapkannya sanksi secara jelas untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan hasil pengamatan serta wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa terdapatnya hambatan yang ikut mempengaruhi proses koordinasi yang berlangsung. Keadaan PKL yang tidak kunjung tertib ini disebabkan oleh akar berdirinya kegiatan penertiban ini yang kurang memperhatikan kepentingan PKL yang akan dipindahkan. Selain itu tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan juga sebagai pelayan masyarakat tidak begitu terlihat. Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya kelanjutan kegiatan dalam upaya menyelesaikan permasalahan PKL hingga saat ini.

## **B. Saran**

Merujuk pada simpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar koordinasi antara Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Tata Kota dan Pariwisata, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Metro dapat ditempuh dengan cara yang baik jika dikaitkan dengan indikator koordinasi yang efektif tersebut, yaitu :

1. Dalam menetapkan suatu kebijakan maupun program pemerintahan, pemerintah diharapkan berorientasi kepada masyarakat. Dalam hal ini yaitu penertiban PKL, sudah seharusnya pemerintah bertindak dengan memikirkan dampak bagi pedagang yang akan dipindahkan. Pemerintah

seharusnya dapat memberikan fasilitas dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

2. Keterangan mengenai informasi terkait permasalahan PKL yang dikomunikasikan dalam rapat saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang diharapkan. Untuk itu diperlukan tindakan yang tepat dari pemerintah dalam mewujudkan penertiban PKL. Seperti melakukan sosialisasi secara persuasif kepada para PKL, memberikan fasilitas yang memadai bagi para PKL, serta menentukan lokasi pemindahan strategis. Apabila memang tidak ditemukan tempat lain selain Pasar Tejo Agung, pemerintah diharapkan dapat melakukan promosi atau himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Metro untuk berbelanja di Pasar Tejo Agung.
3. Penetapan sanksi secara jelas juga dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi. Hal tersebut dapat memberikan kesan tegas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran.